



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JL.Raya Solo No.71 Jiwan Madiun 63121 Telp. (0351) 462787 / Fax. (0351) 4772992



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Guna mencapai kondisi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2022 yang meliputi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menunjukkan arah yang ingin dicapai dalam periode tahun 2018 - 2023. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang menguraikan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. Dokumen tersebut juga berisi tentang indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2022, selain itu juga program kegiatan dan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 dilakukan terhadap sasaran dengan menggunakan indikator yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 sebagian besar sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun beberapa kekurangan pencapaian target yang belum terpenuhi perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan.

Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras dari bidang penanggulangan bencana, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Upaya dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan khususnya bidang penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara Badan



Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dan lintas sektor terkait dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Kabupaten Madiun.

Madiun, 28 Februari 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN



MUHAMAD ZAHROWI, AP, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750819 199412 1 001



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dapat kami susun berkat limpahan rahmat dan hidayahNya dan oleh karena itu puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa sekaligus sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat umumnya dan dalam mencapai misi, tujuan Instansi Pemerintah khususnya agar tercipta penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

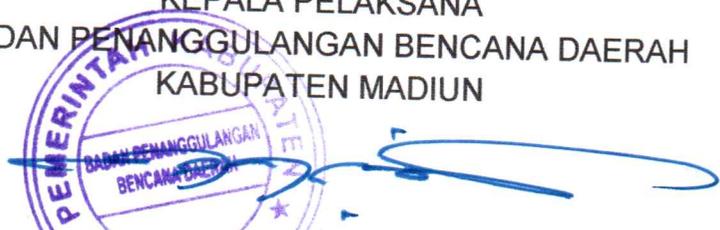
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aktualisasi dari semangat reformasi utamanya guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 telah melaksanakan Program Kegiatan Rutin maupun Program Kegiatan yang menyentuh langsung pada pelayanan masyarakat mendasar pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 maupun Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun yang sama.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagai media evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, juga untuk mengetahui capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian laporan kami, kritik dan saran guna memaksimalkan penyusunan Laporan maupun pelayanan kepada masyarakat tentunya kami harapkan.

Madiun, 28 Februari 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN


MUHAMAD ZAHROWI, AP, MH
Pembina Tingkat I

NIP. 19750819 199412 1 001



DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

1.2 Tugas dan Fungsi

1.3 Isu Strategis

1.4 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A Capaian Kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

B Analisis Penggunaan Anggaran

C Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

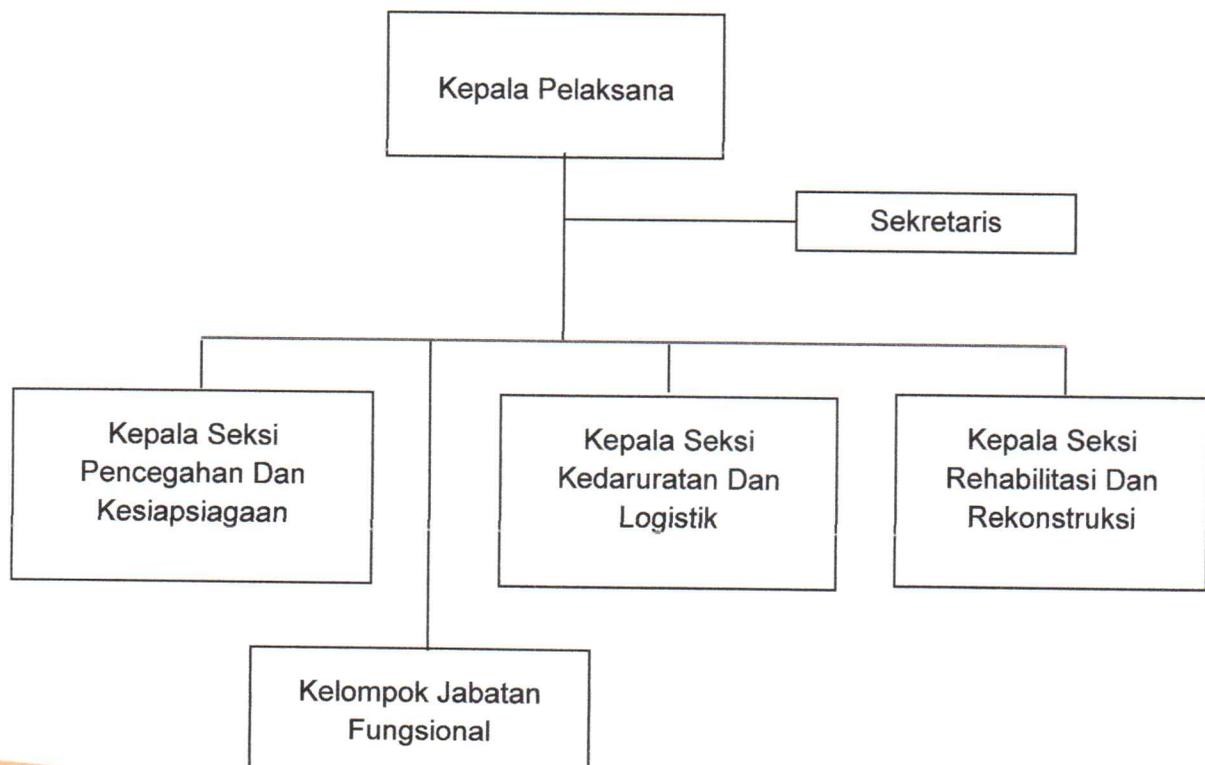
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun termasuk dalam kategori B yang mana Kepala Pelaksana dijabat dari Eselon III yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun yang dijabat secara rangkap (ex – officio) oleh Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana , Sekretariat dan 3 (tiga) Seksi
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
- c. Seksi seksi yang dipimpin kepala Seksi, yang terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 2) Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - 3) Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Apabila digambarkan ke dalam Struktur Organisasi sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN



Didalam susunan organisasi BPBD Kabupaten Madiun seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati Madiun Nomor 70 Tahun 2011 pasal 8, memang tercantum adanya Kelompok Jabatan Fungsional akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan perundang undangan yang menetapkan adanya jabatan fungsional dimaksud. Sedangkan sedianya Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD Kabupaten Madiun sesuai keahlian dan kebutuhan.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Tanggal 8 Nopember 2011 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun didalamnya memuat tugas dan fungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun utamanya Pasal 4 disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan ;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Adapun fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah termuat di dalam pasal 5, sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien ;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.



1.3. ISU STRATEGIS

Beberapa isu - isu strategis nasional yang dapat menjadi peluang dan tantangan dan mempengaruhi peningkatan kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana meliputi :

a. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuan dan sasaran dalam SDG's meliputi :

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana – mana;
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara – negara;
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya samudera dan pesisir untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari,



- memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan ketentraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
 17. Memperkuat sarana pelaksana dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Setidaknya dari 17 (tujuh belas) tujuan SDG's di atas ada beberapa point yang dapat didukung oleh BPBD sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana, yakni :

1. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua;
2. Membangun infrastruktur yang tangguh;
3. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
4. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

b. Arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana

Beberapa point penting dari Arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yakni :

1. Kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah aspek Pencegahan dan Mitigasi Bencana, terintegrasi antara apa yang dilakukan di hulu, tengah dan hilir
2. RIPB 2020 – 2024 harus diturunkan dalam kebijakan, perencanaan, tata ruang yang sensitive dan memperhatikan aspek kerawanan bencana dan dilanjutkan dengan audit lapangan
3. Pengendalian dan penegakan aturan di lapangan, standar bangunan tahan gempa diikuti dengan audit ketahanan bangunan
4. Rencana kontijensi dan operasi saat tanggap darurat harus dapat terimplementasi dengan cepat. Kemampuan melakukan rehabilitasi rekonstruksi yang cepat harus terus diperbaiki
5. Sistem peringatan dini harus dicek, bekerja cepat dan akurat, kecepatan respon harus terus ditingkatkan



6. Edukasi dan literasi kepada masyarakat mengenai kebencanaan harus terus ditingkatkan dari lingkup keluarga. Melakukan simulasi di daerah rawan, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana.

c. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pada Pasal 18 ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai seperti yang tertuang pada pasal 298. Dan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhkan sanksi administratif yang secara lebih jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perangkat daerah pengampu urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu pada Sub Urusan Bencana yang kriteria Standar Pelayanan Minimalnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 mengatur tentang Standar Tenis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana. Berikut standar pelayanan minimal yang termasuk dalam Sub Urusan Bencana:



Salah satu kunci dalam pemberian pelayanan dasar yang berkualitas dan memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan, adalah inovasi dalam pelaksanaan pelayanan dasar tersebut. Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor pendorong utama

terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar tersebut. Inovasi dalam rangka penyelenggaraan dan penyampaian kepada masyarakat menjadi kunci utama peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

d. Inovasi Daerah

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan Daya Saing

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kedepan, antara lain :

- a. Menekankan pentingnya kepada seluruh OPD untuk selalu berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimulai dengan berpola pikir kreatif dan inovatif sebagai salah satu bentuk penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul, menggunakan prinsip-prinsip inovasi, yaitu, peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, berorientasi kepada kepentingan umum, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak untuk kepentingan diri sendiri,
- b. Mengelola inovasi dengan baik, mendokumentasikan dan mempublikasikan inovasi, supaya diketahui oleh masyarakat umum sebagai bentuk pelayanan publik, yang akan berujung pada peningkatan daya saing daerah,
- c. Sinergi pentahelix lebih di per erat. kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta dengan tujuan pembangunan yang berkesinambungan,
- d. Aksi-aksi nyata oleh agen-agen perubahan yang dihasilkan setiap tahun melalui pendidikan pelatihan, dalam melakukan perubahan pada tata kelola pemerintahan,



- e. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, sebagai bentuk konsistensi mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil,
- f. Mengambil peran dalam media sosial sebagai kekuatan baru, dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan.

1.4. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Sesuai hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menunjukkan kategori A dengan nilai 80,20 atau **Memuaskan** dengan rincian penilaian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
a. Perencanaan Kinerja	30 %	25,34 %
b. Pengukuran Kinerja	30 %	19,93 %
c. Pelaporan Kinerja	15 %	14,46 %
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	20,47 %
		80,20 %

Beberapa catatan terkait dengan implementasi SAKIP di BPBD Kabupaten Madiun diantaranya :

- a. Pada perencanaan Indikator Program Prioritas yang pertama "Presentase desa/kelurahan Tangguh bencana di daerah rawan bencana" yang diampu oleh Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan belum didukung dengan anggaran yang memadai.
- b. Belum terdapat inovasi oleh BPBD Kabupaten Madiun sebagai perangkat daerah yang memangku urusan Trantibumlinmas sub urusan bencana.

Hasil evaluasi SAKIP pada keseluruhan komponen menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Madiun memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023. Visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah “ **Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak** “. Dalam mewujudkan Visi tersebut, maka moto yang dipilih sebagai ikon semangat adalah, AYO APIK BARENG... Ayo Apik Bareng adalah seruan untuk menyatukan tekad mewujudkan kebaikan bersama di semua komponen masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun secara utuh, bersinergi dan saling melengkapi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Madiun mempunyai peranan di dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Madiun sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2018-2023. Tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi daerah khususnya pada Misi ke 3 “Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan” yaitu dengan sasaran meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah yang dapat dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana. BPBD sebagai koordinator dapat berperan dalam mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau *sustainable development* dengan menerapkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni:

1. Memberi rekomendasi dan penilaian kondisi kerawan bencana pada titik – titik yang berpotensi untuk dikembangkan perekonomiannya;



2. Mendukung pembangunan infrastruktur yang tagguh;
3. Menciptakan ketangguhan masyarakat dengan membentuk desa/kelurahan Tangguh bencana;
4. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

a. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari pernyataan. Untuk mewujudkan visi dan khususnya misi Bupati Madiun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tujuan yaitu **“Meningkatkan ketahanan bencana daerah”**.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun adalah **“Meningkatnya Kapasitas Daerah”**.

Meningkatnya kapasitas daerah dalam hal ini kemampuan daerah dalam menanggulangi bencana yang dapat diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang terdiri atas 7 fokus prioritas, 16 sasaran aksi dan dibagi menjadi 71 indikator pencapaian. Berikut prioritas dalam pengukuran Indeks Ketahanan Daerah :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan;
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

c. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Adapun penetapan target



Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Utama Kabupaten Madiun dan Target 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023
sebelum perubahan							
Mengurangi Risiko Bencana		Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	55%	79,30%			
	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	1. Jumlah SDM/Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	350 orang	350 orang			
		2. Persentasi kejadian bencana yang tertangani	100%	100%			
		3. Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	100%	100%			
Setelah Perubahan							
Meningkatkan ketahanan bencana daerah		Indeks Resiko Bencana (IRB)			162	160	158
	Meningkatnya Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			0,26	0,3	0,4

d. Program Dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. BPBD menetapkan program programnya sesuai RPJMD periode 2018 – 2023 yaitu :

Program Utama (Teknis)

1. Proram Penanggulangan Bencana.

Program ini merupakan program utama yang mencakup tiga fase utama dalam penanggulangan bencana yaitu mulai fase pra bencana, saat kejadian bencana hingga fase setelah (pasca) bencana, sehingga program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas utama BPBD. Program ini meliputi kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan sub kegiatan :

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana



- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan :
- Respon Cepat Penanganan Bencana
- d) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan sub kegiatan :
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Program Penunjang

2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- d) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan. Perjanjian Kinerja sangat penting untuk dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan program atau kegiatan instansi akan lebih baik, dalam mencapai visi dan misi Bupati. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Madiun tahun



2022 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana terlampir di Lampiran I.

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN - APBD TAHUN ANGGARAN 2022 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatkan Kapasitas Daerah	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,3	Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan/ Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.470.244.469,-	DAU dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 24.225.415.815,-	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Rokok dan Hibah
TOTAL		Rp. 26.695.660.284,-	





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas maupun pemberi amanah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban tersebut yang dijabarkan dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis. Di dalam bab ini dijabarkan pencapaian kinerja masing-masing sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemda Kabupaten Madiun untuk tahun 2022. Pencapaian Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap 2023 (%)
	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja %		
<i>Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana (Sebelum Perubahan)</i>								
1. Jumlah SDM/Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	300 orang	1.500 orang						
2. Persentasi kejadian bencana yang tertangani	100%	100%						
3. Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan	0%	0%						



Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Realisasi			Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian s/d 2022 terhadap 2023 (%)
	2019	2020	2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja %		
<i>Meningkatnya Kapasitas Daerah (Setelah Perubahan)</i>								
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			0,39	0,3	0,42	140%	0,4	105%

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam rangka mengungkap dan menguraikan seberapa jauh suatu rencana atau target kinerja dapat dicapai, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang. Bagian ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja yang menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis.

Sasaran : *Meningkatnya Kapasitas Daerah*

Capaian kinerja Sasaran Meningkatkan kapasitas Daerah adalah 140% dengan predikat sangat baik dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Madiun Tahun 2022 yaitu dengan skor 0,42 atau dalam kategori sedang. Nilai IKD Kabupaten Madiun Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang masih tergolong kategori rendah yaitu 0,39. Berikut disajikan rincian hasil penilaian IKD Kabupaten Madiun Tahun 2022 :

NO	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	IKD	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,65	0,42	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,67		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,61		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,68		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,42		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,30		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20		

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 7 prioritas tersebut, prioritas tertinggi mengenai Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana. Sedangkan prioritas dengan nilai terendah adalah Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana serta Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

Pemerintah Kabupaten Madiun telah memiliki kebijakan tentang Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sedangkan secara kelembagaan diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. BPBD Kabupaten Madiun juga telah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) pada tahun 2022 yang terdiri atas berbagai unsur pentahelix.

Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

Kabupaten Madiun telah memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2016 yang memuat penilaian terkait bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana serta Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2016 yang berisi mengenai program dan rencana pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun. Namun saat ini dokumen tersebut sudah waktunya untuk dilakukan pengkajian ulang.

Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

Pemerintah Kabupaten Madiun telah melakukan pengembangan system informasi, diklat dan logistic memiliki tiga sasaran meliputi informasi dan sosialisasi, kapasitas (Pendidikan dan latihan) serta peralatan dan logistik. Upaya pengembangan informasi dan sosialisasi melibatkan seluruh jajaran organisasi pemangku kepentingan di Kabupaten Madiun. BPBD Kabupaten Madiun juga telah memiliki Pusdalops dengan fasilitas yang mampu memberikan respons efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan pada masa krisis. Peningkatan kapasitas penggunaan peralatan dilakukan melalui gladi untuk meningkatkan kapasitas pusdalops maupun relawan atau Tim Reaksi Cepat. Serta adanya kegiatan pengkajian kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan.



Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengurangan risiko bencana, salah satunya melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Perda tentang RTRW telah mempertimbangkan pengurangan risiko bencana, serta penerapan Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana.

Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Kabupaten Madiun telah berupaya dalam pencegahan dan mitigasi bencana di wilayahnya. Beberapa upaya tersebut meliputi pembuatan sumur resapan perlindungan daerah tangkapan air, restorasi sungai, penguatan lereng, penerapan bangunan tahan gempa bumi, dan penegakan hukum.

Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Perkuatan kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun meliputi tersedianya system peringatan dini (EWS) yaitu EWS banjir sebanyak 9 unit dan EWS longsor 2 unit dimana diadakan uji system seara berkala setiap bulan pada tanggal 26 untuk memastikan semua EWS berfungsi dengan baik. Pengembangan EWS dilakukan secara bersinergis antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. Namun disayangkan Pemerintah Kabupaten Madiun belum memiliki dokumen Rencana Kontijensi sebagai pedoman mengenai proses penanganan situasi darurat bencana pada setiap jenis bahaya/ancaman secara tindakan teknis, manajerial, sistem tanggapan dan pengerahan potensi yang perlu disetujui Bersama. Penanganan darurat bencana akan berjalan efektif jika Pemerintah Daerah memiliki Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang memuat gambaran risiko bencana, sumber daya yang dimiliki, mekanisme penentuan status tanggap darurat, system komando penanganan darurat bencana serta proyeksi kebutuhan bila terjadi bencana.

Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Prioritas ini memiliki nilai terrendah dalam penilaian IKD, yang memuat 4 sasaran meliputi perbaikan pelayanan masyarakat, pemulihan infrastruktur, perbaikan rumah hingga pemulihan penghidupan masyarakat

pasca bencana. Rendahnya nilai ini menunjukkan masih kurang perhatian pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas pasca bencana.

Peningkatan kapasitas daerah merupakan kunci untuk menurunkan resiko yang ditimbulkan akibat dampak kejadian bencana. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menjadikan peningkatan kapasitas sebagai sasaran strategis/utama. Untuk meminimalkan jumlah kerugian yang dapat disebabkan oleh kejadian bencana baik berupa tingkat kerugian, kerusakan maupun jumlah korban jiwa. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan mulai dari tahap pra bencana, saat darurat bencana dan pasca bencana yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penanggulangan Bencana

1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kegiatan ini terdiri atas sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota. Dokumen KRB merupakan dasar dari penyusunan dokumen perencanaan daerah terkait pelaksanaan penanggulangan bencana seperti Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) maupun Dokumen Rencana Kontijensi, dimana semua dokumen tersebut merupakan pemenuhan SPM sub Urusan Bencana sehingga BPBD wajib menyusunnya secara bertahap dan terintegrasi. Mengingat urgensinya Penyusunan Dokumen KRB sehingga harus segera dilaksanakan, namun ternyata sesuai hasil revidi Dokumen Persiapan Pengadaan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Madiun oleh Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor Rev.01/1222/402.302/2022 terdapat kendala dimana waktu pelaksanaan tidak mencukupi untuk dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2022.

2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi berbagai upaya mitigasi yang dilakukan dalam tahap pra bencana untuk meminimalisir risiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini terdiri atas beberapa sub kegiatan yaitu Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi



Bencana, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100%. Laporan kejadian yang masuk segera ditindak lanjuti dengan pengecekan lokasi dan melakukan assesment atau kaji cepat kondisi tanggap darurat, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti perangkat setempat, dinas terkait, polsek, TNI, maupun tim relawan untuk bersama-sama menangani bencana.

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah SDM/Masyarakat yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana dengan capaian 150% atau 90 orang dan melebihi dari target yang hanya 60 orang. Pelatihan ini dilaksanakan di Desa Kare Kecamatan Kare, dan merupakan salah satu upaya mitigasi dengan peningkatan kapasitas relawan maupun aparatur dalam penanggulangan bencana melalui aktivitas sosialisasi dan simulasi penanganan kejadian bencana yang meliputi 6 (enam) unit tanggap darurat yaitu Peringatan dini dan Alat Komunikasi, Evakuasi, Pertolongan Pertama Gawa Darurat, Pengungsian dan Perlindungan, Dapur Umum dan Logistik, serta Kaji Cepat.

- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki indikator Persentase sarana prasarana kesiapsiagaan yang tersedia dengan capaian 100% yang meliputi penyediaan peralatan pendukung kesiapsiagaan meliputi Helm Safety, kamera action Go Pro dan tripod, Kotak penyimpanan tenda serta sewa tempat antenna repeater. Semuanya disediakan dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan.

- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki indikator persentase pemulihan kerusakan akibat bencana dengan capaian 100%. Sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3) terdapat 3



paket kegiatan pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Luworo di Desa Luworo Kec. Pilangkenceng, Rekonstruksi Penahan Tebing Kali Piring Desa Garon (Sal. Pas Gading Balerejo) Kec. Balerejo, serta Rekonstruksi Penahan Tebing Kali Sono Desa Garon (B. Pas. Garon Balerejo) Kec. Balerejo dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp 22.086.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).

- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana dengan capaian 235,7% atau sebanyak 1.650 orang dan melebihi target yang hanya 700 orang. Pada tahun 2022 pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana dilakukan sebanyak 2 kali yaitu dalam rangka Hari Air di Desa Kare Kec. Kare dengan gelar apel serta penanaman tanaman keras. Dan gladi kesiapsiagaan lainnya dilakukan di Alun – Alun Mejayan yaitu gelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang dipimpin langsung oleh Bupati Madiun dan melibatkan sebanyak kurang lebih 1.000 orang dari berbagai unsur pentahelix seperti relawan, forkopimda, OPD terkait serta Media Massa dengan tujuan mengecek kesiapan peralatan dan logistik kebencanaan dari multisektor untuk penanganan kebencanaan.

3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini terdiri atas sub kegiatan Respon Cepat Penanganan Bencana yang memiliki indikator kinerja Jumlah Kejadian Bencana yang Ditangani dengan capaian 100% atau sebanyak 92 kejadian ditangani dari seluruh kejadian bencana. Sub kegiatan ini juga terdiri atas operasional pelaksanaan piket siaga darurat oleh relawan dan pusdalops serta operasional penanganan kejadian bencana. Pada Tahun 2022 terdapat 92 kejadian yang ditangani oleh BPBD Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut :



Tabel Rekapitulasi Kejadian Tahun 2022 Kabupaten Madiun

Kecamatan	Jenis Bencana				TOTAL
	Banjir	Tanah Longsor	Angin Puting Beliung	Kebakaran	
Kebonsari			2		2
Geger			5		5
Dolopo			1		1
Dagangan		6	3		9
Wungu	4		4		8
Kare		4			4
Gemarang	1	2			3
Saradan	9	1	1		11
Pilangkenceng	8		2		10
Mejayan			3		3
Wonoasri	4		2		6
Balerejo	8		2		10
Madiun	11		1		12
Sawahan			2	1	3
Jiwan	1		3	1	5
Jumlah	46	13	31	2	92

4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu jumlah desa tangguh bencana yang aktif dengan capaian 118,75% atau sebanyak 19 desa. Jumlah desa tangguh bencana yang dimaksudkan adalah desa yang berada di Kawasan potensi atau di pusat pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Madiun. Desa Tangguh bencana yang terbentuk hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 19 desa dengan rincian sebagai berikut :

**Desa Tangguh Bencana di Kawasan Prioritas Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

NO	KECAMATAN	DESA RAWAN DI KAWASAN POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI	DESTANA YANG TERBENTUK
1	Mejayan	Ngampel	2021 APBDES
2		Kaliabu	2022 APBDES
3		Pandean	
4		Bangunsari	
5		Krajan	
6		Mejayan	
7		Klecorejo	
8		Blabakan	
9	Wonoasri	Buduran	2020 APBDES
10		Purwosari	2020 APBDES
11		Klitik	2020 APBDES
12	Pilangkenceng	Kenongorejo	



NO	KECAMATAN	DESA RAWAN DI KAWASAN POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI	DESTANA YANG TERBENTUK
13		Muneng	
14		Kedungmaron	
15	Balerejo	Simo	
16		Kuwu	
17		Kedungrejo	
18		Sumberbening	
19		Garon	
20		Glonggong	2019 APBD II
21		Gading	
22		Babadan Lor	
23		Saradan	Sugiharwas
24	Gemarang	Nampu	2020 APBDES
25		Batok	2020 APBDES
26		Winong	2020 APBDES
27		Tawangrejo	2020 APBDES
28	Wungu	Mojopurno	
29		Brumbun	
30		Kresek	
31		Wungu	
32		Nglanduk	
33	Madiun	Bagi	
34		Tiron	
35		Dempelan	
36	Dagangan	Tileng	2020 APBDES
37		Sewulan	2020 APBDES
38		Dagangan	2020 APBDES
39		Mruwak	2020 APBDES
40		Prambon	2020 APBDES
41		Banjarsari Kulon	2020 APBDES
42		Banjarsari wetan	2020 APBDES
43		Ketandan	2020 APBDES
44	Sawahana	Sidomulyo	2020 APBDES

- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah dokumen kebencanaan yang dihasilkan yaitu sebanyak 2 dokumen atau dengan capaian 100%. Dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun 2022 yaitu dokumen Indeks Risiko Bencana (IRB) dan dokumen Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan hasil perhitungan, IRB Kabupaten Madiun tahun 2022 sudah mengalami penurunan menjadi 113,4 atau kategori sedang dari tahun sebelumnya yang masih kategori tinggi. Ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana yang dimiliki mengalami penurunan, hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya

Berdasarkan hasil penilaian terhadap 7 prioritas tersebut, prioritas tertinggi mengenai Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana. Sedangkan prioritas dengan nilai terendah adalah Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana serta Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

Pemerintah Kabupaten Madiun telah memiliki kebijakan tentang Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sedangkan secara kelembagaan diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. BPBD Kabupaten Madiun juga telah membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) pada tahun 2022 yang terdiri atas berbagai unsur pentahelix.

Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

Kabupaten Madiun telah memiliki Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2016 yang memuat penilaian terkait bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana serta Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2016 yang berisi mengenai program dan rencana pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun. Namun saat ini dokumen tersebut sudah waktunya untuk dilakukan pengkajian ulang.

Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

Pemerintah Kabupaten Madiun telah melakukan pengembangan system informasi, diklat dan logistic memiliki tiga sasaran meliputi informasi dan sosialisasi, kapasitas (Pendidikan dan latihan) serta peralatan dan logistik. Upaya pengembangan informasi dan sosialisasi melibatkan seluruh jajaran organisasi pemangku kepentingan di Kabupaten Madiun. BPBD Kabupaten Madiun juga telah memiliki Pusdalops dengan fasilitas yang mampu memberikan respons efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan pada masa krisis. Peningkatan kapasitas penggunaan peralatan dilakukan melalui gladi untuk meningkatkan kapasitas pusdalops maupun relawan atau Tim Reaksi Cepat. Serta adanya kegiatan pengkajian kebutuhan peralatan dan logistic kebencanaan.



Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana

Telah banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pengurangan risiko bencana, salah satunya melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), Perda tentang RTRW telah mempertimbangkan pengurangan risiko bencana, serta penerapan Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana.

Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Kabupaten Madiun telah berupaya dalam pencegahan dan mitigasi bencana di wilayahnya. Beberapa upaya tersebut meliputi pembuatan sumur resapan, perlindungan daerah tangkapan air, restorasi sungai, penguatan lereng, penerapan bangunan tahan gempa bumi, dan penegakan hukum.

Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Perkuatan kesiapsiagaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun meliputi tersedianya system peringatan dini (EWS) yaitu EWS banjir sebanyak 9 unit dan EWS longsor 2 unit dimana diadakan uji system seara berkala setiap bulan pada tanggal 26 untuk memastikan semua EWS berfungsi dengan baik. Pengembangan EWS dilakukan secara bersinergis antara pemerintah dengan masyarakat sekitar. Namun disayangkan Pemerintah Kabupaten Madiun belum memiliki dokumen Rencana Kontijensi sebagai pedoman mengenai proses penanganan situasi darurat bencana pada setiap jenis bahaya/ancaman secara tindakan teknis, manajerial, sistem tanggapan dan pengerahan potensi yang perlu disetujui Bersama. Penanganan darurat bencana akan berjalan efektif jika Pemerintah Daerah memiliki Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang memuat gambaran risiko bencana, sumber daya yang dimiliki, mekanisme penentuan status tanggap darurat, system komando penanganan darurat bencana serta proyeksi kebutuhan bila terjadi bencana.

Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Prioritas ini memiliki nilai terrendah dalam penilaian IKD, yang memuat 4 sasaran meliputi perbaikan pelayanan masyarakat, pemulihan infrastruktur, perbaikan rumah hingga pemulihan penghidupan masyarakat



pasca bencana. Rendahnya nilai ini menunjukkan masih kurang perhatian pemerintah dalam upaya peningkatan kapasitas pasca bencana.

Peningkatan kapasitas daerah merupakan kunci untuk menurunkan resiko yang ditimbulkan akibat dampak kejadian bencana. Untuk itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun menjadikan peningkatan kapasitas sebagai sasaran strategis/utama. Untuk meminimalkan jumlah kerugian yang dapat disebabkan oleh kejadian bencana baik berupa tingkat kerugian, kerusakan maupun jumlah korban jiwa. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan mulai dari tahap pra bencana, saat darurat bencana dan pasca bencana yang diwujudkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Penanggulangan Bencana

1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kegiatan ini terdiri atas sub kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota. Dokumen KRB merupakan dasar dari penyusunan dokumen perencanaan daerah terkait pelaksanaan penanggulangan bencana seperti Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) maupun Dokumen Rencana Kontijensi, dimana semua dokumen tersebut merupakan pemenuhan SPM sub Urusan Bencana sehingga BPBD wajib menyusunnya secara bertahap dan terintegrasi. Mengingat urgensinya Penyusunan Dokumen KRB sehingga harus segera dilaksanakan, namun ternyata sesuai hasil revidi Dokumen Persiapan Pengadaan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Madiun oleh Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor Rev.01/1222/402.302/2022 terdapat kendala dimana waktu pelaksanaan tidak mencukupi untuk dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2022.

2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi berbagai upaya mitigasi yang dilakukan dalam tahap pra bencana untuk meminimalisir risiko bencana dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Kegiatan ini terdiri atas beberapa sub kegiatan yaitu Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi



Bencana, Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota dan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100%. Laporan kejadian yang masuk segera ditindak lanjuti dengan pengecekan lokasi dan melakukan assesment atau kaji cepat kondisi tanggap darurat, kemudian melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti perangkat setempat, dinas terkait, polsek, TNI, maupun tim relawan untuk bersama-sama menangani bencana.

- **Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana**

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah SDM/Masyarakat yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana dengan capaian 150% atau 90 orang dan melebihi dari target yang hanya 60 orang. Pelatihan ini dilaksanakan di Desa Kare Kecamatan Kare, dan merupakan salah satu upaya mitigasi dengan peningkatan kapasitas relawan maupun aparatur dalam penanggulangan bencana melalui aktivitas sosialisasi dan simulasi penanganan kejadian bencana yang meliputi 6 (enam) unit tanggap darurat yaitu Peringatan dini dan Alat Komunikasi, Evakuasi, Pertolongan Pertama Gawa Darurat, Pengungsian dan Perlindungan, Dapur Umum dan Logistik, serta Kaji Cepat.

- **Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini memiliki indikator Persentase sarana prasarana kesiapsiagaan yang tersedia dengan capaian 100% yang meliputi penyediaan peralatan pendukung kesiapsiagaan meliputi Helm Safety, kamera action Go Pro dan tripod, Kotak penyimpanan tenda serta sewa tempat antenna repeater. Semuanya disediakan dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan.

- **Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini memiliki indikator persentase pemulihan kerusakan akibat bencana dengan capaian 100%. Sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3) terdapat 3



paket kegiatan pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Luworo di Desa Luworo Kec. Pilangkenceng, Rekonstruksi Penahan Tebing Kali Piring Desa Garon (Sal. Pas Gading Balerejo) Kec. Balerejo, serta Rekonstruksi Penahan Tebing Kali Sono Desa Garon (B. Pas. Garon Balerejo) Kec. Balerejo dengan total nilai pagu anggaran sebesar Rp 22.086.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).

- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana dengan capaian 235,7% atau sebanyak 1.650 orang dan melebihi target yang hanya 700 orang. Pada tahun 2022 pelaksanaan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana dilakukan sebanyak 2 kali yaitu dalam rangka Hari Air di Desa Kare Kec. Kare dengan gelar apel serta penanaman tanaman keras. Dan gladi kesiapsiagaan lainnya dilakukan di Alun – Alun Mejayan yaitu gelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana yang dipimpin langsung oleh Bupati Madiun dan melibatkan sebanyak kurang lebih 1.000 orang dari berbagai unsur pentahelix seperti relawan, forkopimda, OPD terkait serta Media Massa dengan tujuan mengecek kesiapan peralatan dan logistik kebencanaan dari multisektor untuk penanganan kebencanaan.

3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan ini terdiri atas sub kegiatan Respon Cepat Penanganan Bencana yang memiliki indikator kinerja Jumlah Kejadian Bencana yang Ditangani dengan capaian 100% atau sebanyak 92 kejadian ditangani dari seluruh kejadian bencana. Sub kegiatan ini juga terdiri atas operasional pelaksanaan piket siaga darurat oleh relawan dan pusdalops serta operasional penanganan kejadian bencana. Pada Tahun 2022 terdapat 92 kejadian yang ditangani oleh BPBD Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut :



Tabel Rekapitulasi Kejadian Tahun 2022 Kabupaten Madiun

Kecamatan	Jenis Bencana				TOTAL
	Banjir	Tanah Longsor	Angin Puting Beliung	Kebakaran	
Kebonsari			2		2
Geger			5		5
Dolopo			1		1
Dagangan		6	3		9
Wungu	4		4		8
Kare		4			4
Gemarang	1	2			3
Saradan	9	1	1		11
Pilangkenceng	8		2		10
Mejayan			3		3
Wonoasri	4		2		6
Balerejo	8		2		10
Madiun	11		1		12
Sawahan			2	1	3
Jiwan	1		3	1	5
Jumlah	46	13	31	2	92

4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja yaitu jumlah desa tangguh bencana yang aktif dengan capaian 118,75% atau sebanyak 19 desa. Jumlah desa tangguh bencana yang dimaksudkan adalah desa yang berada di Kawasan potensi atau di pusat pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Madiun. Desa Tangguh bencana yang terbentuk hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 19 desa dengan rincian sebagai berikut :

Desa Tangguh Bencana di Kawasan Prioritas Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah

NO	KECAMATAN	DESA RAWAN DI KAWASAN POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI	DESTANA YANG TERBENTUK
1	Mejayan	Ngampel	2021 APBDES
2		Kaliabu	2022 APBDES
3		Pandean	
4		Bangunsari	
5		Krajan	
6		Mejayan	
7		Klecorejo	
8		Blabakan	
9	Wonoasri	Buduran	2020 APBDES
10		Purwosari	2020 APBDES
11		Klitik	2020 APBDES
12	Pilangkenceng	Kenongorejo	



NO	KECAMATAN	DESA RAWAN DI KAWASAN POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI	DESTANA YANG TERBENTUK
13		Muneng	
14		Kedungmaron	
15	Balerejo	Simo	
16		Kuwu	
17		Kedungrejo	
18		Sumberbening	
19		Garon	
20		Glonggong	2019 APBD II
21		Gading	
22		Babadan Lor	
23		Saradan	Sugiharwas
24	Gemarang	Nampu	2020 APBDES
25		Batok	2020 APBDES
26		Winong	2020 APBDES
27		Tawangrejo	2020 APBDES
28	Wungu	Mojopurno	
29		Brumbun	
30		Kresek	
31		Wungu	
32		Nglanduk	
33	Madiun	Bagi	
34		Tiron	
35		Dempelan	
36	Dagangan	Tileng	2020 APBDES
37		Sewulan	2020 APBDES
38		Dagangan	2020 APBDES
39		Mruwak	2020 APBDES
40		Prambon	2020 APBDES
41		Banjarsari Kulon	2020 APBDES
42		Banjarsari wetan	2020 APBDES
43		Ketandan	2020 APBDES
44	Sawahan	Sidomulyo	2020 APBDES

- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah dokumen kebencanaan yang dihasilkan yaitu sebanyak 2 dokumen atau dengan capaian 100%. Dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun 2022 yaitu dokumen Indeks Risiko Bencana (IRB) dan dokumen Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan hasil perhitungan, IRB Kabupaten Madiun tahun 2022 sudah mengalami penurunan menjadi 113,4 atau kategori sedang dari tahun sebelumnya yang masih kategori tinggi. Ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana yang dimiliki mengalami penurunan, hal ini dapat dipengaruhi oleh adanya

peningkatan kapasitas daerah yang secara rinci dihitung melalui perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Tahun 2022 nilai IKD Kabupaten Madiun mengalami peningkatan yaitu dengan skor 0,42 atau dengan kategori sedang dari tahun sebelumnya yang masih dalam kategori rendah.

- **Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota**

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Desa Tangguh Bencana yang terbentuk yaitu sebanyak 19 desa. Penguatan kelembagaan bencana dilakukan melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Peningkatan Kapasitas relawan. Pembentukan Forum PRB diikuti oleh 150 orang dari berbagai unsur pentahelix, sedangkan peningkatan kapasitas relawan melibatkan 200 orang yang terdiri atas relawan desa Tangguh maupun relawan kecamatan.

❖ **Faktor Pendukung Keberhasilan :**

- Tingkat kesadaran akan pentingnya penanganan bencana pada relawan/masyarakat cukup tinggi
- Peran Koordinasi dan sinergitas dari 5 aspek pentaheliks dalam penanggulangan mulai meningkat walau belum optimal
- Dukungan anggaran dan partisipasi yang tinggi dari Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

❖ **Permasalahan :**

- Masih kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap pencapaian SPM sub Urusan Bencana sebagai prioritas utama sehingga masih minimnya dukungan anggaran

❖ **Strategi Pemecahan Masalah :**

- BPBD semakin meningkatkan koordinasi dan inisiasi untuk mengenalkan Penanggulangan Bencana kepada seluruh stakeholder, dunia usaha dan media masa.
- Meningkatkan peran mereka dalam upaya penanggulangan bencana.
- Membangkitkan semangat peduli bencana kepada masyarakat maupun pemerintah desa melalui berbagai kegiatan salah satunya



melalui desa tangguh bencana.

- Untuk peningkatan pemahaman mengenai konsep penurunan risiko bencana BPBD bekerjasama dengan konsultan untuk menyusun dokumen kebencanaan dan konsep perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

❖ **Rencana Tindak Lanjut :**

- Melanjutkan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana di desa rawan bencana lainnya dengan meningkatkan partisipasi desa.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergisme pentahelix sehingga dapat bersama sama bersinergi menanggulangi bencana secara optimal.
- Memprioritaskan kegiatan - kegiatan yang merupakan capaian SPM dalam perencanaan tahun berikutnya.

B. ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN

Program Penanggulangan Bencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 24.225.415.815,- terealisasi sebesar Rp. 23.010.796.676,- atau 94,99%. Program ini terdiri atas Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- tidak terealisasi atau 0%, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.767.816.565,- terealisasi Rp. 21.807.851.240,- atau 95,78% , Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 641.464.050,- terealisasi Rp. 640.011.386,- atau 99,77%, serta Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan jumlah anggaran Rp. 566.135.200,- terealisasi Rp. 562.934.050,- atau 99,43%. Sedangkan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki anggaran sebesar Rp. 2.470.244.469,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.288.307.158,- atau 92,63%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada lampiran.

Tingkat efisiensi kinerja BPBD Kabupaten Madiun seperti digambarkan pada tabel terlampir. Sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) memiliki tingkat efisiensi yang tinggi hingga 45,23%, dimana capaian kinerja indikator IKD telah melebihi target yang ditentukan. Secara garis besar pelaksanaan kegiatan dan



sudah mencapai target yang ditetapkan namun terdapat satu sub kegiatan dengan realisasi 0% yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini tidak mencukupi waktu yang dibutuhkan untuk proses lelang pengadaannya. Tingkat efisiensi tertinggi yaitu pada sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan indikator Jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana dari target 700 orang dapat terealisasi sebanyak 1.650 orang sehingga tingkat efisiensi mencapai 141,71%. Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki tingkat ketercapaian yang seimbang antara target indikator dengan capaian realisasi anggarannya.



REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)
BELANJA	26.695.660.284,00	25.299.103.834,00	94,77
BELANJA OPERASI	4.549.843.340,00	4.103.132.579,00	90,18
Belanja Pegawai	1.687.359.200,00	1.508.857.432,00	89,42
Belanja Barang dan Jasa	2.862.484.140,00	2.594.275.147,00	90,63
BELANJA MODAL	22.145.816.944,00	21.195.971.255,00	95,71
Belanja Peralatan dan Mesin	59.816.944,00	59.657.600,00	99,73
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	22.086.000.000,00	21.136.313.655,00	95,70
	(26.695.660.284,00)	(25.299.103.834,00)	94,77
	(26.695.660.284,00)	(25.299.103.834,00)	94,77
SURPLUS / (DEFISIT)			
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)			



CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% Capaian Kinerja	PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	% Capaian Anggaran	EFISIENSI
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,3	0,42	140%	26.695.660.284	25.299.103.834	94,77%	45,23%

No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	% Capaian Kinerja	PAGU ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)	% Capaian Anggaran	EFISIENSI
A.	Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana terbentuk	68,20%	(19 desa/44 desa)x100% = 43,18%	63,31%	24.225.415.815	23.010.796.676	94,99	
		2. persentase korban terdampak bencana yang ditangani	100%	100%	100%				
		3. persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan	100%	100%	100%				
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	84 kejadian	92 kejadian	109,52%	250.000.000	0	0%	109,52%
1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun	1 Dokumen	0	0%	250.000.000	0	0%	0%
2.	Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	22.767.816.565	21.807.851.240	95.78%	4,22%



2.1.	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah SDM / Masyarakat yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana	60 Orang	90 Orang	150%	45.844.613	42.449.900	92,60%	57,40%
2.2.	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana kesiapsiagaan yang tersedia	100%	100%	100%	44.766.900	44.600.400	99,63%	0,37%
2.3.	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase pemulihan kerusakan akibat bencana	100%	100%	100%	22.581.783.052	21.631.118.440	95,79%	4,21%
2.4.	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana	700 orang	1650 orang	235,7%	95.422.000	89.682.500	93,99%	141,71%
3.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani	100%	100%	100%	641.464.050	640.011.386	99,77%	0,23%
3.1.	Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Bencana	Jumlah kejadian bencana yang ditangani	84 kejadian	92 kejadian	109,52%	641.464.050	640.011.386	99,77%	0,23%
4.	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah desa Tangguh bencana yang aktif	16 desa	19 desa	118,75%	566.135.200	562.934.050	99,43%	19,32%
4.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebencanaan yang dihasilkan	2 dokumen	2 dokumen	100%	99.715.000	98.795.000	99,08%	0,92%
4.2.	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	16 desa	19 desa	118,75%	169.452.000	167.470.000	98,83	19,32%
4.3.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah laporan kejadian bencana yang diterima	84 kejadian	92 kejadian	109,52%	296.968.200	296.669.050	99,90	9,62%
B.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	83 88	80,20 79,53	96,62% 90,38%	2.470.244.469	2.288.307.158	92,63%	



1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	1.678.059.200	1.501.857.432	89,50%	10,5%
1.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN selama setahun	100%	100%	100%	1.678.059.200	1.501.857.432	89,50%	10,5%
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	272.056.305	270.556.785	99,45%	0,55%
2.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	100%	100%	100%	3.215.465	3.209.000	99,80%	0,20%
2.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	100%	100%	100%	35.827.627	34.878.000	97,35%	2,65%
2.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	100%	100%	6.102.635	5.821.035	95,39%	4,61%
2.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	100%	100%	100%	67.956.288	67.834.100	99,82%	0,18%
2.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	100%	17.200.290	17.192.600	99,96%	0,04%
2.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	141.754.000	141.622.050	99,91%	0,09%
3.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	100%	100%	100%	114.950.000	114.438.000	99,55%	0,45%
3.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kebutuhan pengiriman surat yang terpenuhi	100%	100%	100%	600.000	88.000	14,33%	85,33%
3.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	100%	92.600.000	92.600.000	100%	0%
3.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	21.750.000	21.750.000	100%	0%



C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BPBD Kabupaten Madiun dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja maka direkomendasikan :

1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD terkait optimalisasi dalam perencanaan anggaran terhadap dukungan Indikator program prioritas yang pertama “Persentase desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana” dan menerapkan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis)
 - ➔ Telah ditindaklanjuti dengan mengarahkan desa – desa untuk secara mandiri membentuk desa tangguh bencana, dan BPBD menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.
2. Menggali inovasi di bidang penanggulangan bencana dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Madiun
 - ➔ Telah ditindaklanjuti dengan pengembangan aplikasi MIB (Mitigasi Bencana) yaitu aplikasi pelayanan penanggulangan bencana berbasis teknologi untuk memperoleh informasi kejadian bencana secara *real time*, dan memudahkan dalam hal pelaporan kejadian bencana serta penyebarluasan informasi kebencanaan.





BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 disusun sebagai wujud komitmen dalam upaya melaksanakan pembangunan di bidang Kebencanaan menuju pada tata pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini merupakan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana program dan kegiatan yang merupakan implementasi dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023. Program Dan Kegiatan yang telah dilaksanakan mengarah pada pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Madiun maupun Renstra BPBD Kabupaten Madiun sesuai dengan Misi dan tujuan yang hendak dicapai. Meskipun sebagian besar sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun beberapa kekurangan pencapaian target yang belum terpenuhi perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke depan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Madiun yang kami susun dengan harapan untuk tahun berikutnya lebih baik dan bermanfaat bagi pelayanan masyarakat utamanya dalam upaya melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bahaya terhadap bencana.



LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
INSPEKTORAT

Jl. MT. Haryono Telp. (0351) 453412
e-mail : inspektorat@madiunkab.go.id

CARUBAN

Nomor : 790/1779/402.060/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Implementasi SAKIP pada
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Madiun Tahun 2021

Caruban, 1 Agustus 2022
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Madiun
di

MADIUN

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum yang menjadi acuan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022 adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, dan
- 6) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Madiun Nomor 094/1595/402.060/2022 tanggal 15 Juli 2022

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Sasaran evaluasi adalah Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal Pemerintah Kabupaten Madiun dengan ruang lingkup:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni dengan melakukan kombinasi atas metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kemanfaatannya

Dalam menilai pemenuhan suatu kriteria pada masing-masing OPD didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator.

Teknik evaluasi yang digunakan antara lain:

- 1) Pengumpulan data dan informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada Perangkat Daerah.
- 2) Studi Dokumentasi, yang dilakukan dengan melihat pemenuhan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada website sakip.madiunkab.go.id dan dokumen lain yang menunjang.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Madiun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2011 merupakan perangkat daerah, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, badan tersebut mempunyai fungsi:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
3. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana, kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun telah menindaklanjuti hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2021.

2. Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi kami sampaikan secara terperinci menunjukkan kategori **A** atau **memuaskan** dengan nilai sebesar **80,20**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun** dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot		Nilai	
	2021	2022	Akuntabilitas Kinerja	
			2021	2022
a. Perencanaan Kinerja	30 %	30 %	24,98 %	25,34 %
b. Pengukuran Kinerja	25 %	30 %	20,94 %	19,93 %
c. Pelaporan Kinerja	15 %	15 %	13,56 %	14,46 %
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10 %	25 %	8,02 %	20,47 %
e. Capaian Kinerja (untuk Tahun 2021)	20 %		12,54	
Jumlah	100 %	100 %	80,04 %	80,20 %

Beberapa catatan terkait dengan implementasi SAKIP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun diantaranya :

- a. Pada Perencanaan Indikator Program Prioritas yang pertama "Persentase desa/keurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana" yang diampu oleh seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan belum didukung dengan anggaran yang memadai.
- b. Belum terdapat inovasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun sebagai perangkat Daerah yang memangku urusan di bidang penanggulangan bencana

3. Penutup

a. Simpulan

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada keseluruhan komponen menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja kami memberikan rekomendasi penyempurnaan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan BAPPEDA dan BPKAD terkait optimalisasi dalam perencanaan anggaran terhadap dukungan Indikator program prioritas yang pertama "Persentase desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana" yang diampu oleh seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta menerapkan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis).
2. Menggali inovasi di bidang penanggulangan bencana dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun.

Demikian Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja dan bahan evaluasi Saudara. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun



Drs. AGUS BUDI WAHYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620801 198203 1 006